

BAB II

STRATEGI OPTIMALISASI KERJA SAMA

Bab II dalam skripsi ini membahas strategi optimalisasi kerja sama *sister province* antara Provinsi Jawa Tengah dan Negara Bagian Queensland dalam mendorong penerapan teknologi agrikultur berkelanjutan pasca pandemi Covid-19. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam empat bagian utama. Pertama, membahas profil dan potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh kedua wilayah. Kedua, menelaah dinamika dan implementasi kerja sama *sister province* yang telah berjalan. Ketiga, mengidentifikasi tantangan utama, khususnya ketimpangan dalam kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta menganalisis upaya-upaya strategis yang telah dilakukan untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian. Keempat, membandingkan potensi kerja sama *sister province* alternatif yang dapat menjadi referensi atau pelengkap dalam memperluas jaringan paradiplomasi Jawa Tengah. Dengan struktur ini, bab ini memberikan gambaran komprehensif yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama internasional di sektor agrikultur, khususnya antara Jawa Tengah dan Queensland, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2.1. Profil dan Potensi Sektor Pertanian Jawa Tengah-Queensland

2.1.1. Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi strategis di Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Secara geografis, Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibu

kota yang berada di Kota Semarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai sekitar 37 juta jiwa, menjadikannya provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayah Jawa Tengah adalah sekitar 32.548 km² atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa, yang membentang dari pantai utara hingga pegunungan selatan.

Jawa Tengah mencakup beragam karakteristik geografis sehingga menjadi wilayah yang cukup subur untuk budidaya pertanian dan perkebunan, seperti curah hujan yang cukup, dataran rendah, daerah pesisir, lahan subur yang terbentang di berbagai lereng gunung, lahan vulkanik yang subur yang berada di jalur cincin api dunia (*ring of fire*) dan memiliki banyak gunung aktif seperti gunung Slamet, Sindoro, Merbabu, Merapi dan Ungaran (Susanti, 2023). Kondisi fisiografi Jawa Tengah ditinjau dari tingkat kemiringan lahannya terdiri dari : 38% lahan dengan kemiringan 0-2%, 31% lahan dengan kemiringan 2- 15%, 19% lahan dengan kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan dengan kemiringan lebih dari 40% (Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Posisi geografis Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa memberikan keunggulan logistik dan konektivitas yang mendukung pergerakan barang dan jasa, terutama karena didukung oleh infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, serta akses tol Trans Jawa. Selain itu, provinsi ini juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang sangat kuat, dengan kota-kota seperti Solo dan Yogyakarta (sebagai wilayah istimewa yang berdampingan), yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa.

Dari segi sumber daya manusia, Jawa Tengah memiliki potensi besar karena didukung oleh banyak institusi pendidikan tinggi ternama, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal Soedirman dan universitas lainnya yang tersebar di Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah yang potensial dalam pengembangan sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan.

Secara ekonomi, Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi dengan struktur ekonomi yang cukup seimbang. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama sebesar 33,93% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 13,53%, dan Perdagangan dengan kontribusi sebesar 13,60% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023). Salah satunya, provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah strategis di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi signifikan dalam sektor pertanian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah yang mencapai 13,9% pada tahun 2022, menjadikannya sebagai salah satu sektor utama penggerak ekonomi daerah (Badan Pusat Statistik Jawa tengah, 2023). Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah terus berkembang dalam sektor industri dan jasa, pertanian tetap memainkan peran vital dalam struktur ekonomi provinsi.

Komoditas pertanian unggulan Jawa Tengah cukup beragam, mencerminkan kekayaan agroekosistem yang dimiliki. Tanaman pangan seperti

padi dan jagung menjadi tulang punggung ketahanan pangan, sementara komoditas seperti tebu, hortikultura (seperti cabai dan tomat), serta hasil perkebunan seperti kelapa, karet, kopi, kakao dan tebu yang menjadi komoditas strategis untuk pasar domestik maupun ekspor (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023). Distribusi komoditas ini tersebar di berbagai kabupaten, seperti padi yang mendominasi di Grobogan dan Sragen, batang tebu di wilayah Rembang dan Pati, serta kopi dan hortikultura yang berkembang di daerah dataran tinggi seperti Temanggung dan Banjarnegara (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Dari segi sumber daya, Jawa Tengah memiliki sekitar 1,4 juta hektar lahan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan lahan pertanian terluas di Indonesia (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023). Selain itu, pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 29,78% dari total angkatan kerja, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 19,09% dan perdagangan sebesar 18,50% (Susanti, 2023). Namun, potensi ini dihadapkan pada tantangan serius, terutama dalam hal struktur kepemilikan lahan yang terfragmentasi.

Dalam dunia pertanian, dikenal istilah petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa. Menurut Khudori dalam wawancara pada hari Selasa, 5 Desember 2023, bahwa jumlah petani gurem Indonesia semakin meningkat. Dapat diartikan bahwa barisan orang miskin dari sektor pertanian kian bertambah. Dengan mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektar, penghasilan dari sektor pertanian

dipastikan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga (Tempo, 2023). Berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018, struktur rumah tangga petani Jawa Tengah yang menguasai lahan lebih dari 5 hektar sekitar 0,12%. Rumah tangga yang menguasai lahan 3-5 hektar sekitar 0,30%. Sedangkan rumah tangga pertanian yang menguasai lahan 1-3 hektar sekitar 5,10%. Rumah tangga petani yang menguasai lahan 0,5-1 hektar sekitar 13,53% (Susanti, 2023).

Selain itu, akses terhadap teknologi pertanian modern di kalangan petani masih terbatas. Adopsi Alat Mesin Pertanian (Alsintan), penggunaan benih unggul, serta pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen pertanian masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang riset dan adaptasi pertanian. Banyak petani masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam, sementara kemampuan untuk mengakses pelatihan atau pendampingan teknologi pertanian modern masih sangat terbatas (Pindah Jateng, 2024).

Di Jawa Tengah, transformasi digital masih berjalan secara bertahap dan kapasitas teknis aparatur. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan sistem Single Sign-On (SSO) untuk e-Government, yang berfungsi sebagai solusi terintegrasi untuk menyederhanakan akses pengguna terhadap berbagai aplikasi layanan digital pemerintah. Melalui mekanisme ini, pengguna cukup melakukan satu kali proses login untuk dapat mengakses seluruh aplikasi yang tergabung dalam ekosistem *e-Government* Jawa Tengah. Sistem ini disediakan dalam bentuk portal web tunggal yang menjadi gerbang utama bagi

pegawai maupun masyarakat dalam menggunakan layanan digital secara efisien dan aman. Dengan demikian, SSO tidak hanya meningkatkan kemudahan akses, tetapi juga memperkuat integrasi data dan efisiensi pelayanan publik digital di tingkat provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2018). Namun, aplikasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena minimnya informasi mengenai website tersebut.

Dengan kondisi tersebut, pengembangan sektor pertanian di Jawa Tengah membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pemberdayaan petani sebagai pelaku utama, kesenjangan pembangunan antarwilayah, urbanisasi yang tidak merata, serta kemiskinan di beberapa daerah pedesaan. Oleh karena itu, strategi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan terintegrasi menjadi penting untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah ke depan. Kunci utamanya terletak pada peningkatan akses terhadap penerapan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan sistemik dari pemerintah daerah dan mitra internasional, termasuk melalui kerja sama *sister province* dengan Queensland yang memiliki pengalaman maju dalam pertanian berkelanjutan.

2.1.2. Queensland

Queensland merupakan salah satu negara bagian terbesar yang terletak di Australia Timur dan terpenting di Australia, baik dari segi luas wilayah maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional. Terletak di bagian timur laut benua Australia, Queensland memiliki luas wilayah sekitar 1,85 juta km²,

menjadikannya negara bagian terbesar kedua setelah Australia Barat (Move to More, 2024). Dengan ibu kota di Brisbane, Queensland memiliki populasi sekitar 5,4 juta jiwa pada tahun 2023, dan merupakan negara bagian dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Australia, sebagian besar disebabkan oleh migrasi antarnegara bagian dan internasional (Queensland Government Statistician's Office, 2023).

Queensland dikenal sebagai “*Sunshine State*” karena iklim tropis dan subtropisnya yang mendukung pariwisata sepanjang tahun. Wilayah ini juga menjadi destinasi utama wisatawan internasional karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk *Great Barrier Reef* yang merupakan warisan dunia, serta kota-kota pesisir seperti *Gold Coast* dan *Cairns* yang populer sebagai tujuan wisata (Move to More, 2024). Di samping itu, Queensland juga menjadi pusat pendidikan dan riset penting di Australia, dengan kehadiran salah satu universitas ternama seperti University of Queensland (UQ). Institusi ini mendukung riset di berbagai bidang, mulai dari ilmu lingkungan hingga teknologi digital, serta berperan besar dalam pengembangan pertanian regional (Dodd, 2024).

Secara ekonomi, Queensland memiliki struktur ekonomi yang beragam karena Queensland menjadi salah satu pasar tercepat dan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sektor jasa, pertambangan, konstruksi, dan pendidikan internasional menjadi kontributor besar terhadap *Gross State Product* (GSP) Queensland. Pada tahun 2022, GSP Queensland mencapai lebih dari \$503 miliar mencerminkan posisi pentingnya dalam perekonomian nasional Australia (Queensland Government, 2023). Pemerintah negara bagian Queensland juga

memiliki agenda pembangunan yang progresif, dengan fokus pada transformasi digital, transisi energi terbarukan, dan pembangunan regional yang inklusif. Selain itu, Queensland terus berkembang melalui kebijakan kerja sama internasional dengan berbagai negara dan wilayah mitra, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari strategi diplomasi subnasional dan perluasan jejaring ekonomi global. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA*) yang berlaku sejak 2020, yang menjadi landasan utama kemitraan ini. Perjanjian ini memberikan akses yang lebih luas bagi eksportir Australia, termasuk di sektor pertanian, pendidikan, dan jasa (Whalan, 2025).

Queensland menjadi salah satu negara bagian utama di Australia yang memiliki peranan penting dalam sektor agrikultur. Kontribusi sektor pertanian terhadap GSP Queensland meningkat 8,9% pada tahun 2022 hingga 2023, yang mencerminkan posisi agrikultur sebagai bagian signifikan dalam perekonomian negara bagian ini (Australian Bureau of Statistics, 2024). Kondisi cuaca yang baik menyebabkan peningkatan produksi dan ekspor daging, biji-bijian sereal, dan serat tekstil dari Queensland. Meskipun persentasenya terlihat kecil jika dibandingkan dengan sektor jasa atau industri, nilai ekonomi absolut dari agrikultur Queensland sangat besar mengingat skala produksi dan ekspor yang luas. Keberagaman ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar dan iklim, serta menunjang ketahanan pangan dan ekonomi negara bagian. Dapat dilihat bahwa Queensland tidak kebal terhadap tantangan ekonomi global ini, negara bagian ini berada dalam posisi yang selalu berusaha untuk

mengatasinya dan terus menikmati kondisi pasar tenaga kerja yang sangat kuat (State Development, Infrastructure and Planning, 2024).

Berdasarkan data dari Census QuickStats oleh Australian Bureau of Statistics (ABS) (2021), tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk Queensland berusia 15 tahun ke atas menunjukkan bahwa 21,9% memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi, 9,4% memiliki diploma lanjutan, dan 3,6% memiliki sertifikat tingkat IV. Secara keseluruhan, sekitar 34,9% penduduk Queensland telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Terlihat dari perbedaan ini mencerminkan kesenjangan dalam tingkat pendidikan antara kedua wilayah, yang dapat memengaruhi peran masing-masing dalam kerja sama internasional, seperti dalam program pelatihan atau riset bersama. Pihak Queensland cenderung berperan sebagai penyedia teknologi dan pelatih, sementara pihak Jawa Tengah lebih sering menjadi peserta pelatihan.

Dapat dipahami bahwa munculnya tantangan signifikan dan menimbulkan adanya interdependensi asimetris. Seperti, ketersediaan sumber daya ini menjadikan Queensland tidak hanya sebagai produsen komoditas unggulan, tetapi juga sebagai pusat inovasi teknologi agrikultur yang mampu terus beradaptasi dengan tantangan global, dengan sektor AgTech yang berkembang pesat. Pemerintah Queensland telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendorong inovasi dalam pertanian, termasuk pendirian pusat-pusat inovasi seperti *Agtech and Logistics Hub* di Toowoomba dan jaringan *Smart Farms* yang berfokus pada penerapan teknologi canggih dalam pertanian (Advance Government, 2024). Di samping itu, pemerintah Queensland telah menerapkan

sistem pelayanan publik berbasis digital secara luas melalui strategi "Digital Economy Strategy 2023–2026". Strategi ini mencakup pengembangan layanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, serta peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi tersebut. Selain itu, kebijakan "*Digital Services Policy*" memberikan panduan bagi departemen pemerintah dalam merancang, menyampaikan, dan mengelola layanan digital yang berorientasi pada pengguna (Queensland Government, 2023).

Salah satu keunggulan utama sektor agrikultur Queensland adalah infrastrukturnya yang sangat mendukung riset dan inovasi. Contohnya, divisi riset Departemen Pertanian dan Perikanan Queensland (*Department of Agriculture and Fisheries Queensland Science Division*) menjadi pusat pengembangan teknologi agrikultur modern yang terus mendorong efisiensi dan produktivitas pertanian. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian presisi, seperti sensor tanah, drone pemantau lahan, dan sistem irigasi otomatis, telah meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya serta meminimalkan dampak lingkungan (Department of Agriculture and Fisheries Queensland, 2022).

Lebih jauh lagi, ekosistem *agritech* di Queensland tergolong maju dan matang, terbentuk melalui kolaborasi erat antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta. Sinergi ini menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan langsung di lapangan serta mendukung *start-up* dan perusahaan teknologi pertanian. Saat menghadapi pasca pandemi Covid-19, Queensland berfokus pada memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan efisiensi penggunaan air yang sangat vital di wilayah semi-kering untuk kualitas hidup generasi mendatang, menciptakan

lapangan kerja, mendorong pertumbuhan industri, serta mengakselerasi digitalisasi pertanian untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (State Development, Infrastructure and Planning, 2024). Dengan segala keunggulan tersebut, sektor pertanian Queensland menjadi contoh pengelolaan agrikultur yang berkelanjutan dan berteknologi tinggi, sekaligus membuka peluang besar bagi kerja sama internasional untuk transfer teknologi dan inovasi pertanian, khususnya kerja sama *sister province* dengan Jawa Tengah.

2.2. Dinamika dan Implementasi Kerja Sama *Sister Province* Jawa Tengah-Queensland

2.2.1. Kondisi sektor Pertanian Jawa Tengah-Queensland Pasca Pandemi Covid-19

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung ekonomi di Provinsi Jawa Tengah maupun Negara Bagian Queensland, Australia. Di kedua wilayah ini, pertanian tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menopang kehidupan masyarakat pedesaan. Sebelum pandemi Covid-19, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah mengalami pertumbuhan paling rendah dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 3,64% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020). Komoditas utama yang menjadi andalan antara lain padi, jagung, cabai, dan hortikultura, dengan wilayah sentra produksi tersebar di kabupaten seperti Grobogan, Klaten, dan Banyumas. Namun, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural seperti rendahnya tingkat pendidikan petani, keterbatasan akses terhadap

teknologi modern, dan minimnya permodalan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda pada awal 2020 membawa dampak besar terhadap rantai pasok agrikultur di Jawa Tengah. Namun, sektor pertanian berada di posisi ketiga sebagai sektor yang paling tidak berdampak. Dengan maksud, sektor pertanian Jawa Tengah mengalami gangguan atau penurunan aktivitas usaha yang relatif kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya selama masa pandemi Covid-19 dan masih tetap beroperasi serta memenuhi fungsinya meskipun tetap mengalami hambatan namun tidak separah sektor lainnya. Seperti, pembatasan mobilitas dan penutupan pasar tradisional menghambat distribusi hasil panen, mengakibatkan penurunan harga komoditas dan penurunan pendapatan petani hingga 15–20% pada kuartal kedua 2020 (Bhosale, 2020, sebagaimana dikutip dalam Efendi, 2022). Gangguan logistik juga menyebabkan kelangkaan input produksi seperti pupuk dan benih. Namun, pandemi ini secara tidak langsung mendorong pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi. Beberapa inisiatif yang muncul termasuk pengembangan *urban farming*, digitalisasi penyuluhan pertanian, serta revitalisasi lumbung pangan lokal (Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, 2023). Pemerintah juga mulai memperkuat program-program pertanian berkelanjutan berbasis komunitas dan memanfaatkan media daring untuk memperluas edukasi bagi petani muda.

Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) menekankan pentingnya pelatihan virtual bagi petani untuk

memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Pelatihan secara daring dianggap sebagai solusi strategis dalam mengatasi pembatasan sosial sekaligus mempercepat adaptasi teknologi pertanian oleh petani. Kementan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk aktif dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing petani di tengah tantangan global (Antara News, 2020).

Hal ini terlihat bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan pertanian para petani melalui platform *online* dan pelatihan berbasis teknologi. Salah satu program yang diimplementasikan adalah “Petani *Go Online*”, hasil kerja sama antara Pemerintah Jawa Tengah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Walaupun program ini dilaksanakan sebelum adanya pandemi, akan tetapi program ini telah diperkenalkan di beberapa kabupaten seperti Batang dan Purbalingga, dengan tujuan memperkenalkan aplikasi digital untuk pemasaran hasil panen, akses informasi pertanian, dan layanan keuangan. Di Kabupaten Batang, program ini melibatkan sekitar 600 petani dan 100 penyuluh pertanian dari 15 kecamatan (Kementerian Kominfo, 2018; Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, 2019). Namun, program ini tidak berkelanjutan dan publikasi media terakhir di tahun 2018.

Selain itu, program “Piramida *Smartfarm* Kampung Gagot” juga dikembangkan guna menciptakan socioagropreneur muda melalui edukasi pertanian terpadu yang mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan model bisnis berkelanjutan (Pindah Jateng, 2023). Di Kabupaten

Klaten, Komunitas Petani Muda Klaten (KPMK) turut aktif dalam mengadakan diskusi bertajuk “Ngobrol Pertanian (Ngoper)” yang melibatkan *content creator* untuk mengajarkan strategi pemasaran digital, dengan tujuan mendorong kreativitas dalam distribusi hasil pertanian melalui media sosial (Haq, 2024). Penelitian oleh Dharmawan (2024) turut memperkuat bahwa adopsi media sosial oleh petani milenial di Jawa Tengah berdampak positif terhadap kinerja bisnis mereka, dengan peningkatan omset sebesar 25% setelah pemanfaatan platform digital untuk pemasaran.

Sementara itu, kondisi pertanian di Queensland menunjukkan karakteristik yang lebih maju secara sistemik. Sebelum pandemi, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sekitar 7,8% dari total *Gross State Product* (GSP). Ketika pandemi melanda, sektor ini mengalami penurunan yang pertama kali tercatat dalam sejarah hingga 1,9% (Department of Agriculture and Fisheries Queensland, 2022). Pada tahun 2020 hingga 2021, GSP pertanian Queensland diperkirakan naik sebesar 7% menjadi \$65 miliar (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, 2020). Bahkan, sebagian besar tahun dalam 3 dekade terakhir, “*cropping sector*” (termasuk hortikultura) memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap GSP pertanian daripada sektor peternakan. Namun, kedua sektor tersebut secara umum memberikan kontribusi yang sama terhadap ekspor karena sebagian besar produk hortikultura bernilai lebih dari \$12 miliar per tahun di Australia (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, 2020).

Pasca pandemi, kedua wilayah menunjukkan tren pemulihan yang saling melengkapi. Di Jawa Tengah, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Jawa Tengah 2023 sebesar 13,23% (turun dari 13,53% di tahun 2019), menunjukkan pemulihan secara keseluruhan meski belum merata di seluruh wilayah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024). Banyak kelompok tani yang mulai mengadopsi pendekatan pertanian lebih modern melalui pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mitra internasional. Sementara itu, Queensland terus memperkuat kapasitas pertaniannya dengan investasi besar di sektor riset agrikultur, teknologi rendah emisi, serta inovasi berbasis kecerdasan buatan untuk efisiensi produksi (Department of Agriculture and Fisheries Queensland, 2022).

Meskipun pandemi Covid-19 mengungkap ketimpangan kapasitas struktural dan sistemik antara Jawa Tengah dan Queensland, kerja sama *sister province* yang sudah ada sejak 1991 tetap relevan sebagai platform *mutual learning*. Dalam pasca-pandemi, kerja sama ini berpotensi lebih strategis karena masing-masing pihak memiliki keunggulan yang saling melengkapi: Queensland dengan teknologi dan riset agrikultur modern, serta Jawa Tengah dengan sumber daya manusia, semangat adopsi untuk penerapan teknologi pertanian lokal, dan pasar domestik yang besar. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih tahan krisis, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

2.2.2. Bentuk Kerja Sama yang Telah Terjalin

Kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland secara resmi dimulai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)

pada tahun 1991 dan setelah memperbaharui MoU ke-5, kemudian MoU diperbarui pada tahun 2019 untuk memperkuat dan memperluas lingkup kerja sama tersebut (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019). MoU ini merupakan bagian dari diplomasi subnasional yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor antara kedua wilayah melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan langsung antar pemerintah daerah. MoU ini menetapkan fokus utama kerja sama pada empat sektor strategis, yaitu pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, promosi kebudayaan dan pariwisata, serta pengembangan pembangunan fasilitas layanan kesehatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Bentuk kerja sama dapat dilihat dalam kunjungan resmi pejabat Queensland ke Jawa Tengah, antara Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Investasi Queensland, Cameron Dick, dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pertemuan ini membahas rencana yang berfokus pada pertukaran guru/dosen/mahasiswa, kemitraan antar sekolah, ambisi bersama untuk mengembangkan energi terbarukan yang bersih untuk upaya menuju emisi nol bersih, dan kunjungan resmi ke Queensland dan Jawa Tengah (Queensland Government, 2023).

Selama ini, kontribusi investasi Australia ke Jawa Tengah masih relatif kecil, menempati posisi ke-23 dengan nilai sekitar \$3,15 juta, atau hanya setara 0,04% dari total investasi sebesar \$7,4 miliar di provinsi tersebut, yang sebagian besar berasal dari Jepang dan Korea Selatan. Beberapa sektor yang tengah menjadi fokus untuk dikembangkan lebih lanjut meliputi peternakan, pertanian,

pariwisata, dan industri manufaktur. Dengan adanya kerja sama yang dibangun, diharapkan nilai investasi dari Queensland, Australia ke Jawa Tengah dapat meningkat hingga mencapai kisaran hingga \$20 juta. Salah satu hasil konkret dari kerja sama ini adalah adanya kesepakatan pembelian produk mebel asal Jawa Tengah senilai \$150 ribu per bulan selama satu tahun (Antara News, 2019). Sementara itu, dalam bidang pendidikan, telah ada pengiriman 31 guru ke Australia, dengan 25 diantaranya mengikuti program pelatihan singkat di University of Queensland (UQ). Ke depan, imbuhan Gus Yasin, bentuk kerja sama akan diperluas dengan menyertakan program pertukaran pelajar jenjang SMA, SMK, dan MA (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Bukan hanya dalam seputar pemerintah dan lembaga saja, di sektor kesehatan, kerja sama dapat dilakukan dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas layanan kesehatan masyarakat dan sistem tanggap darurat, seperti pertukaran perawat antara Mater Hospital Brisbane, Queensland, dan Rumah Sakit Dr Kariadi di Semarang juga telah dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan antarstaf. Queensland dengan bangga memberikan paket dukungan senilai \$2 juta bagi Jawa Tengah untuk memberikan bantuan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang berharga bagi mereka untuk bangkit saat ekonomi Jawa Tengah bangkit dari Covid-19 (Queensland Government, 2023).

Kerja sama dalam bidang agrikultur telah menghasilkan sejumlah kegiatan nyata yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan modernisasi pertanian Indonesia. Salah satu program penting adalah *Australia Awards Short Course on*

Grain Value Chain Leadership Program yang diselenggarakan oleh University of Queensland (UQ) dan didanai oleh IA-CEPA ECP (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) Katalis, sebuah inisiatif kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Program ini melibatkan 25 peserta dari Indonesia, termasuk pelaku industri, akademisi, dan perusahaan rintisan, yang mengikuti pelatihan di Australia untuk memahami rantai nilai biji-bijian, manajemen pertanian modern, dan prinsip agribisnis berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial peserta, serta mendorong regenerasi petani yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global (The University of Queensland Australia 2023).

Selain pelatihan, terdapat juga kegiatan studi banding ke Queensland yang melibatkan petani, akademisi, dan praktisi pertanian dari Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kerja sama paradiplomasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Queensland di bidang pertanian. Studi banding ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar langsung tentang manajemen pertanian berkelanjutan, termasuk teknik irigasi efisien, pengelolaan lahan, dan penggunaan teknologi presisi. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan peserta, tetapi juga membuka peluang adaptasi teknologi sesuai dengan kondisi lokal baik di Indonesia maupun di daerah, khususnya di Jawa Tengah (Sari, 2022).

Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang nyata terlihat dalam sektor ekspor furnitur dari Jawa Tengah ke Queensland. Produk yang paling diminati adalah furnitur outdoor berbahan kayu jati seperti kursi taman, bangku, meja bistro, dan set patio tahan cuaca, yang cocok untuk iklim tropis dan gaya hidup

luar ruang khas Queensland (Marzuki, 2021). Perusahaan PT Multay International Indonesia, yang berbasis di Demak, telah berhasil mengekspor produk meja ke Australia dengan nilai mencapai Rp340 juta (Simanjuntak, 2024). Selain itu, kisah unik datang dari Miftahudin, pengrajin mebel asal Jepara yang kini mengekspor peti jenazah ke Australia, meneruskan usaha keluarganya dan membuka ceruk pasar ekspor baru dari produk tradisional ukiran Jepara. Bermula adanya pandemi Covid-19, industri mebel dan kerajinan Jepara mengalami penurunan pemesanan, baik dalam negeri dan luar negeri. Sehingga Miftahudin banting setir membuat peti jenazah yang membawa keuntungan dalam perekonomian (Indozone Life, 2022).

Kerja sama ini membuka peluang ekonomi bagi Queensland, karena menjalin kerja sama dengan Indonesia, termasuk provinsi besar seperti Jawa Tengah memungkinkan mereka memperluas pengaruh *soft power* Australia di tingkat lokal. Program seperti pertukaran pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pemerintahan lokal melalui training yang difasilitasi oleh Queensland, menunjukkan bahwa kerja sama ini bergerak ke arah *mutual benefit*, meskipun masih terdapat ketimpangan struktural. Oleh karena itu, meskipun terdapat asimetri dalam kapasitas teknologi dan SDM, kerja sama *sister province* tetap dapat menjadi sarana pembelajaran dua arah dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, jika disertai dengan desain program yang inklusif, adaptif, dan partisipatif.

Selain itu, walaupun kerja sama ini bukan dengan Queensland, akan tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani *Letter of Intent* (LoI)

dengan UNESCO-IHE (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering*) *Institute for Water Education* Belanda pada acara World Water Forum ke-10 di Bali. Pejabat Gubernur Nana Sudjana, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan air, terutama dalam menghadapi persoalan seperti banjir, rob, dan kekeringan. UNESCO-IHE dipilih karena reputasinya sebagai lembaga pendidikan air internasional yang berpengalaman dalam membina profesional di sektor ini. Sebelumnya, kerja sama serupa pernah dilakukan pada periode 2016 hingga 2021. Dengan adanya LoI baru ini, kedua pihak melanjutkan pertemuan teknis, baik di Semarang maupun Belanda. Fokus kerja sama meliputi pengembangan sistem polder, perlindungan pesisir, sanitasi dan air minum, pengelolaan limbah, serta ketahanan wilayah pesisir utara Jawa Tengah terhadap perubahan iklim (Antara News, 2023). Hal ini sejalan dengan kebutuhan dan juga mendukung implementasi dari kerja sama lainnya yang telah dilaksanakan.

Dengan berbagai bentuk kerja sama yang telah terlaksana, hubungan *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland menunjukkan arah yang positif dan relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Dinamika positif yang tidak hanya terbatas pada pengembangan kapasitas teknis, tetapi juga mempererat hubungan kelembagaan dan budaya. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk mempertahankan prinsip *mutual benefit* jangka panjang yang mendukung pembangunan berkelanjutan di kedua wilayah. Kerja sama antar pemerintah daerah lintas negara memiliki makna bahwa adanya potensi besar dalam

mempercepat pembangunan daerah melalui transfer pengetahuan, pertukaran budaya, dan kekuatan kebijakan yang lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan semangat *paradiplomacy* dalam hubungan internasional kontemporer, di mana aktor subnasional semakin memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan lokal dan global (Kuznetsov, 2015).

2.2.3. Tantangan dalam Implementasi Kerja Sama Jawa Tengah-Queensland

Meskipun kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland telah menghasilkan berbagai bentuk kerja sama yang positif, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini menghambat optimalisasi hasil kerja sama dan berisiko mengurangi efektivitas keberlanjutan hubungan bilateral tersebut. Salah satu tantangan utama adalah minimnya forum koordinasi lintas aktor yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Minimnya forum komunikasi yang terstruktur dan berlangsung secara rutin menyebabkan kurangnya sinkronisasi program yang dijalankan oleh masing-masing aktor, sehingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan di lapangan (Masrohatun, 2018). Ketidakhadiran koordinasi lintas sektor ini mencerminkan pentingnya *multi-stakeholder governance* dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri di tingkat daerah.

Di sisi lain, aspek legalitas dan regulasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia. Pemerintah daerah memang diberikan ruang untuk berperan aktif dalam kerja sama internasional berdasarkan

kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan tetap harus tunduk pada peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 (Mukti, 2020). Di satu sisi, regulasi-regulasi ini memberikan legitimasi dan perlindungan terhadap aktivitas kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah, namun disisi lain, banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami prosedur kerja sama luar negeri yang sesuai dengan kerangka hukum nasional, sehingga berpotensi menghambat kecepatan dan kelancaran proses pelaksanaan program (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Selain masalah regulasi, tantangan juga muncul dari belum optimalnya adaptasi program atau teknologi yang dibawa oleh Queensland ke Jawa Tengah. Meskipun Queensland dikenal sebagai wilayah dengan inovasi dan kapasitas teknologi yang tinggi, transfer pengetahuan dan teknologi ini sering kali belum disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi lokal, terutama dalam hal aksesibilitas sumber daya, kapasitas SDM, dan kultur kerja masyarakat. Teknologi dan inovasi yang diterapkan di Indonesia seringkali masih mengadopsi model skala besar dan mekanisasi yang tidak sesuai dengan karakteristik agraris masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh petani kecil dan berujung pada kurang efektifnya program peningkatan produktivitas (Pratama, 2021). Kurangnya upaya adaptasi teknologi, berpotensi menurunkan tingkat

keberhasilan program, karena penerima manfaat tidak memiliki kesiapan atau sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikannya.

Di sisi lain, implementasi kerja sama juga belum didukung oleh sistem evaluasi dan *monitoring* yang terstruktur. Tidak adanya mekanisme evaluasi berkala membuat pelaksanaan kerja sama cenderung berjalan secara acak tanpa umpan balik yang memadai untuk perbaikan ke depan. Tanpa data evaluatif yang kuat, sulit untuk mengukur efektivitas kerja sama, mengidentifikasi hambatan yang muncul, maupun merumuskan strategi penguatan program yang lebih tepat sasaran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menekankan pentingnya integrasi sistem pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari *good governance* (Darmawan et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam mengimplementasikan program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menilai kualitas dampak dari program yang dijalankan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland tidak hanya bergantung pada kekuatan isi perjanjiannya, tetapi juga pada kualitas koordinasi, kesesuaian teknologi, memperkuat regulasi, dan keberlanjutan evaluasi program. Keberlanjutan dan efektivitas kerja sama lintas wilayah sangat ditentukan oleh tata kelola implementasi yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap lokal. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, potensi besar dari kerja sama ini sulit diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

2.3. Komparasi Potensi Kerja Sama *Sister Province* Alternatif

2.3.1. *Sister Province* Fujian

Provinsi Fujian, Tiongkok, merupakan mitra strategis yang memiliki potensi besar dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia, khususnya dengan Jawa Tengah. Hubungan *sister province* antara Jawa Tengah dan Fujian telah berlangsung selama lebih dari 21 tahun sejak tahun 2003 dan terus menunjukkan perkembangan yang positif dan produktif (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024). Kerja sama ini didukung oleh berbagai inisiatif dan program yang difokuskan pada pengembangan kawasan industri, investasi, serta penguatan hubungan sosial budaya. Salah satu program utama yang menjadi tonggak kerja sama adalah proyek *Two Countries, Twin Parks* (TCTP), yang menghubungkan kawasan industri di Fujian dengan kawasan industri di Indonesia. Di Tiongkok, kawasan industri ini terletak di Yuanhong Investment Zone, Fuqing, Provinsi Fujian, dengan luas sekitar 61 km². Sementara di Indonesia, kawasan industri mencakup Bintan Industrial Estate, Aviarna Industrial Estate, dan Grand Batang City di Jawa Tengah, dengan total luas sekitar 87,6 km² (Xinhua, 2022). Proyek ini difokuskan pada lima sektor utama: perikanan laut, pertanian tropis, industri ringan dan tekstil, mesin dan elektronik, serta pertambangan hijau. Lebih dari 70 proyek bilateral telah diluncurkan dengan total investasi melebihi 93 miliar yuan (sekitar 13,5 triliun rupiah) (Antara News, 2025).

Selain itu, Fujian dikenal sebagai pintu gerbang penting bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar Tiongkok, terutama produk halal yang memiliki potensi besar mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pemerintah Fujian juga aktif mendorong investasi dari pelaku

bisnis lokal ke Indonesia, termasuk di sektor ekonomi hijau (Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2023). Investasi ini tidak hanya menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat integrasi sektor industri kedua wilayah.

Di samping sektor industri dan perdagangan, Fujian juga menunjukkan perhatian pada sektor pertanian, yang masih menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi Tiongkok. Menurut data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok, pada tahun 2023, nilai tambah dari sektor pertanian dan industri terkait mencapai 19,8534 triliun yuan, yang setara dengan 15,34% dari PDB nasional (National Bureau of Statistics of China, 2024).

Kerja sama antara Fujian dan Indonesia juga didukung oleh hubungan sosial budaya yang kuat, mengingat banyak masyarakat Tionghoa-Indonesia yang berasal dari Fujian. Hal ini mempermudah pengembangan *people-to-people contacts* melalui program pertukaran pelajar, beasiswa, serta kerja sama pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkot Serang, 2023; Ditjen Pendidikan Vokasi, 2024).

Secara keseluruhan, Fujian menawarkan potensi kerja sama yang luas dan beragam, mulai dari pengembangan kawasan industri, investasi berkelanjutan, penguatan perdagangan produk halal, hingga pengembangan sumber daya manusia dan hubungan sosial budaya. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi Jawa Tengah dalam jaringan ekonomi regional, tetapi juga mendukung

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berubah.

2.3.2. *Sister Province* Chungcheongbuk-do

Provinsi Chungcheongbuk-do merupakan satu-satunya provinsi yang terkurung daratan di Korea Selatan, terletak di bagian tengah negara tersebut dengan luas sekitar 7.400 km² dan populasi sekitar 1,6 juta jiwa. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh pegunungan seperti Sobaek dan Charyeong, serta memiliki dataran rendah di sepanjang sungai utama, yang menciptakan iklim kontinental dengan empat musim yang jelas (Lee, 2025). Kondisi geografis ini memberikan keunikan tersendiri, sekaligus tantangan dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur.

Kerjasama *sister province* dengan Chungcheongbuk-do telah terjalin sejak tahun 2004 dan mencakup pendidikan, ekonomi, teknologi informasi, media, olahraga, pertanian, dan reformasi birokrasi. Gus Yasin menuturkan bahwa Korea Selatan merupakan mitra investasi peringkat II di Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah per triwulan I tahun 2023, dengan performa investasi sebesar 98.437,30 ribu dolar AS (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Dari sisi ekonomi, Chungcheongbuk-do memiliki basis industri yang cukup beragam, meliputi sektor manufaktur seperti bahan kimia, mesin, tekstil, dan pengolahan makanan. Provinsi ini juga dikenal sebagai pusat industri masa depan, dengan fokus pada pengembangan baterai sekunder, tenaga surya, dan semikonduktor yang menjadi tulang punggung ekonomi modern Korea Selatan

(Invest Korea, 2021). Keberadaan lebih dari 3.600 perusahaan di kawasan industri utama seperti Cheongju, Chungju, dan Jincheon menunjukkan tingkat industrialisasi yang cukup tinggi. Selain itu, provinsi ini memiliki sumber daya mineral seperti emas, besi, dan batu bara yang mendukung sektor pertambangan (Dun & Bradstreet, 2023).

Selain sektor industri dan pertambangan, sektor pertanian juga menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi Chungcheongbuk-do. Meskipun wilayah ini didominasi oleh pegunungan, terdapat dataran rendah yang subur yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pemerintah provinsi aktif mengembangkan teknologi pertanian modern dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, termasuk penggunaan teknologi digital dan otomatisasi dalam pengelolaan lahan (Smart City Korea, 2022). Hal ini sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan di tingkat regional.

Dalam kerja sama internasional, Chungcheongbuk-do telah menjalin hubungan persahabatan dan kemitraan dengan beberapa wilayah di Asia, termasuk provinsi Zhejiang di Tiongkok. Potensi kerja sama yang dapat dikembangkan meliputi pertukaran teknologi, pendidikan, budaya, serta pengembangan industri dan pariwisata. Dengan latar pendidikan dan riset yang menonjol, tentunya keunggulan Chungcheongbuk-do dalam teknologi tinggi dan riset dapat menjadi nilai tambah bagi mitra kerja sama yang ingin mengembangkan inovasi dan kapasitas SDM.

Secara umum, potensi kerja sama dengan Chungcheongbuk-do sebagai mitra alternatif bagi Jawa Tengah terletak pada kekuatan sektor industri modern, pengembangan riset dan pendidikan, serta warisan budaya yang kuat. Provinsi Chungcheongbuk-do memberikan sekitar 1.000 beasiswa untuk studi sarjana di Chungcheongbuk-do, yang memungkinkan lulusan SMA/SMK dari Jawa Tengah untuk kuliah sambil bekerja di perusahaan Korea Selatan. Selain itu, terdapat upaya peningkatan kompetensi sekolah vokasi di Jawa Tengah agar sesuai dengan kebutuhan industri (Humas Jateng, 2023). Meskipun sektor pertanian tidak menjadi fokus utama, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang didukung oleh Chungcheongbuk-do dapat memberikan manfaat tidak langsung bagi sektor pertanian di Jawa Tengah. Namun, sebagai provinsi yang terkurung daratan, tantangan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas perlu diperhatikan agar kerja sama dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2.3.3. Perbandingan dengan *Sister Province* Queensland

Queensland, Australia, merupakan salah satu provinsi yang memiliki hubungan *sister province* dengan Jawa Tengah sejak tahun 1991. Kerja sama ini sudah berlangsung lebih dari tiga dekade dan mencakup berbagai sektor penting seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan, pengelolaan bencana, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Queensland dikenal sebagai wilayah yang maju dengan ekonomi yang beragam, termasuk sektor pertanian, pendidikan, dan teknologi, serta memiliki sistem pemerintahan dan infrastruktur yang mapan. Selama pandemi Covid-19, Queensland memberikan dukungan signifikan berupa bantuan finansial dan program pemulihan sosial yang

berdampak langsung pada masyarakat Jawa Tengah. Selain itu, program beasiswa dan pelatihan yang berkelanjutan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, sementara kolaborasi riset mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, termasuk pengembangan teknologi pertanian.

Di sisi lain, provinsi Fujian di Tiongkok merupakan kerja sama yang cukup potensial, yang lebih berfokus pada pengembangan kawasan industri dan investasi besar, seperti proyek *Two Countries, Twin Parks* (TCTP) yang menghubungkan kawasan industri Fujian dengan Batang dan Bintan di Indonesia. Fokus kerja sama Fujian lebih kepada penguatan infrastruktur industri, investasi teknologi hijau, dan pengembangan hubungan sosial budaya melalui pertukaran pelajar dan pendidikan vokasi. Meskipun Fujian juga memiliki sektor pertanian yang berkembang, kerja sama dengan Jawa Tengah lebih banyak berorientasi pada aspek industri dan perdagangan produk halal yang memiliki pasar besar di Tiongkok.

Sementara itu, provinsi Chungcheongbuk-do di Korea Selatan menonjol dalam pengembangan teknologi tinggi dan inovasi industri, dengan basis manufaktur kuat di bidang bahan kimia, semikonduktor, dan energi terbarukan, serta didukung oleh ekosistem riset dan pendidikan yang maju. Hubungan sosial budaya yang kuat membuka peluang pengembangan program pertukaran budaya dan pendidikan vokasi yang intensif. Namun, kerja sama Chungcheongbuk-do dengan Jawa Tengah lebih terfokus pada bidang teknologi dan industri, sehingga cakupannya belum seluas Queensland.

Perbedaan utama antara ketiga kerja sama *sister province* ini terletak pada durasi dan intensitas hubungan serta fokus sektor yang dikembangkan. Queensland memiliki hubungan yang lebih lama dan menyeluruh dengan Jawa Tengah, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang telah teruji selama lebih dari tiga dekade. Kerja sama ini didukung oleh mekanisme pendanaan dan pelaksanaan yang jelas, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga implementasinya lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sebaliknya, Fujian lebih berorientasi pada investasi industri dan perdagangan, sementara Chungcheongbuk-do lebih fokus pada teknologi dan inovasi yang masih dalam tahap pengembangan kerja sama.

Penulis memilih mengkaji kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland karena hubungan ini telah teruji secara historis dan memberikan dampak nyata di berbagai bidang pembangunan daerah. Kerja sama ini lebih komprehensif dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jawa Tengah secara menyeluruh, termasuk sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sementara itu, kerja sama dengan Fujian dan Chungcheongbuk-do masih relatif baru dan lebih terbatas pada bidang tertentu, sehingga belum memberikan gambaran yang cukup luas untuk analisis multidimensional dalam pembangunan Jawa Tengah.